

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dominasi etnis Bugis dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bombana. Sejak pelaksanaan Pilkada langsung pertama pada tahun 2005 hingga pemilihan terakhir tahun 2024, seluruh bupati yang terpilih berasal dari etnis Bugis. Bahkan, pada Pilkada 2024, seluruh kandidat yang maju berasal dari etnis yang sama, mencerminkan kuatnya dominasi politik kelompok ini di tingkat lokal. Dominasi mereka dalam kontestasi politik daerah menunjukkan bahwa proses integrasi dan akumulasi kekuatan dan strategi politik yang dilakukan berlangsung secara sistematis dan efektif. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk ditelaah, mengingat etnis Bugis juga merupakan kelompok pendatang di wilayah Bombana.

Daftar bupati terpilih yang berlatar belakang etnis bugis:

1. Atikurahman 2005 – 2010
2. Tafdil 2011 – 2016
3. Tafdil 2017 – 2022
4. Burhanuddin 2024

Kabupaten Bombana adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Buton. Kabupaten Bombana resmi terbentuk pada 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah laut sekitar 11.837,31 km² dan luas daratan sekitar 3.316,16 km². Jumlah penduduk Kabupaten Bombana pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 166.134 jiwa, dengan dihuni oleh berbagai etnis, antara lain Jawa, Bali, Bajo, Buton, Tolaki, Bugis, dan Moronene, yang dikenal sebagai suku asli daerah tersebut.

Tabel 1. Persentase Penduduk Kabupaten Bombana Menurut Suku

No.	suku	Jumlah
1.	Jawa	3,84 %
2.	Bali	1,35 %
3.	Bajo	3,63 %
4.	Bugis	51,65 %
5.	Buton	5,29 %
6.	Moronene	21,45 %
7.	Muna	4,42 %
8.	Tolaki	1,20 %

Berdasarkan data sensus penduduk BPS tahun 2010, etnis Bugis merupakan kelompok dengan populasi terbesar, yaitu 51,65% dari total penduduk, sementara Moronene sebesar 21,45%. Sehingga dominasi jumlah ini berpotensi menjadi faktor utama yang menyebabkan kandidat dari etnis Bugis secara konsisten memenangkan pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut. Keberhasilan tersebut dapat didukung karena adanya solidaritas etnis yang kuat di antara masyarakat Bugis. Solidaritas ini tercermin kemungkinan dalam dukungan politik yang solid terhadap calon-calon dari kelompok mereka, yang memanfaatkan isu kesamaan etnis, jaringan sosial dan kekerabatan untuk mengonsolidasikan suara dan memperkuat posisi politik di tingkat lokal.

Selain itu, kandidat dari etnis Bugis juga diduga memanfaatkan strategi politik identitas secara fleksibel untuk menjangkau kelompok etnis lain, terutama etnis Moronene yang merupakan suku asli dan memiliki basis suara yang cukup signifikan. Praktik ini dapat terlihat dalam simbol-simbol kampanye, seperti penggunaan atribut pakaian adat etnis bajo dan moronene oleh beberapa kandidat dalam Pilkada 2024 sebagai bentuk pendekatan kultural dan pencitraan politik. Dengan demikian, dominasi politik etnis Bugis di Bombana tidak hanya dilandasi oleh kekuatan internal komunitas, tetapi juga strategi adaptif dalam membangun koalisi lintas etnis demi memperluas dukungan elektoral.

Contoh strategi lain yang digunakan terlihat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2011, kandidat dari etnis Bugis, H. Tafdil, menggandeng Hj. Masyhura Illadamay yang berasal dari etnis Moronene sebagai calon wakil bupati. Pasangan ini berhasil meraih kemenangan atas kompetitornya, Subhan Tambara, yang merupakan tokoh Moronene, berpasangan dengan Aziz Baking dari etnis Bugis. Pola yang sama kembali terjadi pada Pilkada 2017, di mana H. Tafdil kembali

mencalonkan diri dan menggandeng Johan Salim, juga dari etnis Moronene, sebagai pasangannya. Mereka berhasil mengungguli pasangan Kasra Jaru Munara tokoh Moronene dan Man Arfah dari etnis Bugis. Fakta ini menunjukkan bahwa pasangan calon yang dipimpin oleh figur utama dari etnis Bugis cenderung lebih diterima oleh pemilih dibandingkan pasangan yang dipimpin oleh tokoh Moronene meskipun sama-sama didukung oleh elemen etnis Bugis. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa etnis Bugis memiliki posisi dominan dalam lanskap politik lokal, baik secara simbolik maupun strategis. Dominasi tersebut tidak hanya didasarkan pada jumlah populasi yang besar, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap kapasitas kepemimpinan yang diasosiasikan dengan etnis Bugis. Dengan demikian, meskipun keterwakilan etnis Moronene tetap hadir dalam struktur pasangan calon, mereka lebih sering menempati posisi pendamping ketimbang sebagai pemimpin utama.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut dengan judul “DOMINASI ETNIK BUGIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOMBANA”. Dengan adanya keberagaman etnis di Bombana dan pola pertarungan politik dalam pemilihan kepala daerah yang memperlihatkan kecenderungan identitas, maka menarik jika penelitian ini dilihat dalam perspektif politik identitas. Keberagaman kelompok identitas di Indonesia, termasuk etnis, yang saling berinteraksi dalam konteks negara, telah menjadikan politik identitas sebagai topik yang menarik bagi penelitian dalam bidang ilmu sosial. Isu terkait identitas memiliki pengaruh besar dan sering menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan masyarakat pada pemilihan umum, dengan polarisasi yang umumnya berakar pada faktor etnis dan agama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nofridi et al (2022) menganalisis bagaimana politik identitas etnis memainkan peran penting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh, dengan fokus pada kemenangan pasangan calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dalam Pilkada 2017.

Pada penelitian ini mereka melihat faktor desentralisasi menjadi salah satu penyebab terjadinya politik etnis di Aceh. Calon kepala daerah sering menggunakan citra putra daerah dan kesamaan identitas etnis untuk meraup suara dari masyarakat yang memiliki identitas etnis yang sama. Namun Penelitian ini hanya memfokuskan diri pada satu peristiwa politik spesifik, yakni Pilkada 2017. Hal ini bisa membatasi pemahaman terhadap dinamika politik identitas etnis yang lebih luas di Aceh. Dinamika politik identitas etnis tidak selalu tercermin hanya dalam satu peristiwa pemilu, sehingga penelitian ini bisa jadi tidak menggambarkan keseluruhan konteks sosial-politik Aceh. Penelitian ini juga tidak cukup memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kemenangan pasangan Irwandi-Nova terhadap dinamika politik identitas etnis yang lebih luas. Misalnya, bagaimana kemenangan tersebut mempengaruhi hubungan antar etnis atau kelompok sosial lainnya di Aceh.

Penelitian lain dilakukan oleh Arri Bima Prasetya (2022) yang berjudul “Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 Di Kota Tarakan”, yang mengkaji pengaruh politik identitas dalam Pilkada Serentak 2019 di Kota Tarakan,

yang merupakan kota majemuk dengan keberagaman etnis dan agama. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana politik identitas dimainkan dalam Pilkada di kota Tarakan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elit politik dan calon kepala daerah memanfaatkan politik identitas terutama terkait etnis dan agama—untuk memperoleh dukungan dan mempertahankan kekuasaan, yang berdampak pada polarisasi sosial. Masyarakat Tarakan lebih mementingkan figur dan kesamaan latar belakang daripada kemampuan calon, menjadikan politik identitas sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kemenangan etnis bugis dalam empat kali pemilihan kepala daerah, tidak hanya satu periode pemilihan saja. Penelitian ini juga menjelaskan posisi orang bugis sebagai etnis pendatang di Bombana, namun dapat mendominasi kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika politik identitas etnis dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah multikultural seperti Kabupaten Bombana. Penelitian ini juga memperkaya kajian politik identitas dengan mengkaji bagaimana identitas etnis, terutama suku Bugis sebagai kelompok dominan, dapat memberikan pengaruh terhadap hasil pemilihan. Kontribusi teoritis lainnya adalah pada pengembangan konsep politik identitas yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena serupa di daerah lain dengan keberagaman etnis yang tinggi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan insight baru mengenai dampak jangka panjang dari politik identitas terhadap keberagaman sosial dan stabilitas politik, yang dapat dijadikan referensi dalam kajian mengenai pengelolaan pluralitas dalam sistem politik Indonesia yang lebih luas.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana etnis bugis menegosiasikan kepentingan mereka dengan etnis lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Memahami faktor dominasi etnis bugis dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bombana

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Secara teoritis penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai politik identitas etnis dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah multikultural seperti Kabupaten Bombana. Penelitian ini memperkaya kajian politik identitas dengan mengkaji bagaimana identitas etnis, terutama suku Bugis sebagai kelompok dominan, memengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilihan. Kontribusi teoritis lainnya adalah pada pengembangan konsep **politik identitas** yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena serupa di daerah lain dengan keberagaman etnis yang tinggi.
- 2) Secara praktis penelitian ini juga memberikan insight baru mengenai dampak jangka panjang dari politik identitas terhadap **keberagaman sosial** dan stabilitas politik, yang dapat dijadikan referensi dalam kajian dan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pluralitas di kabupaten Bombana dan dalam sistem politik Indonesia yang lebih luas.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Politik Etnik

Milton Jacob Esman adalah salah satu ilmuwan politik dan ahli hubungan etnis yang banyak menulis tentang politik etnik, yaitu keterlibatan kelompok etnis dalam proses politik, terutama dalam konteks negara-negara berkembang atau multi-etnis. Dalam bukunya *Ethnik Politik* (1994), ia menyatakan bahwa politik etnik terjadi ketika identitas etnis digunakan sebagai dasar mobilisasi politik. Artinya, kelompok etnis memperjuangkan hak, sumber daya, atau pengakuan identitas mereka melalui saluran politik, baik secara damai maupun konfrontatif. Jika dikaitkan dengan dominasi etnis bugis dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bombana, dimana etnis bugis sebagai kelompok pendatang menggunakan solidaritas etnis yang sama, maka itu adalah bentuk dari mobilisasi politik etnik. Dengan melihat juga persentase pemilih etnik Moronene yang cukup besar,

sehingga membuat elit Moronene sebagai kekuatan tandingan, elit bugis dan moronene dapat memainkan peran dalam pembentukan koalisi politik, distribusi kekuasaan dan narasi kampanye untuk mencegah konfrontasi.

Milton J, Esman (1994) menyatakan bahwa politik etnik bukan sekedar konflik, tapi juga soal negosiasi. Banyak kelompok etnik juga menggunakan cara-cara damai dan legal, seperti membentuk partai politik etnis, melakukan lobi, atau terlibat dalam sistem demokrasi untuk menyuarakan kepentingan kelompok lain. Dalam sistem demokrasi, politik identitas tidak hanya perpecahan, tapi juga proses negosiasi antar kelompok etnis yang bisa dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah kabupaten Bombana, bisa jadi ada kelompok etnis, termasuk bugis dan moronene berupaya mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah yang mewakili kedua kelompok atau ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan lokal untuk menciptakan stabilitas politik. Hal ini didukung oleh teori dalam penelitian yang berjudul *Elections, Ethnicity and Political Instability* yang menyatakan bahwa pemilihan umum bisa mengurangi ketidakstabilan politik yang disertai kekerasan di negara-negara yang paling terpecah-pecah secara etnis, hal ini karena pemilu memaksa elit politik membentuk koalisi dan masih memberi peluang pihak yang kalah di pemilu yang akan datang.

Selain itu, Milton juga menekankan bahwa kelompok etnis dapat menggunakan politik untuk mengintegrasikan diri dalam tatanan sosial dan politik yang lebih besar, terutama dalam negara yang memiliki banyak kelompok etnis yang berbeda. Dalam hal ini, meskipun bugis mungkin awalnya dilihat sebagai pendatang, mereka mungkin menggunakan politics of identity untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan etnis moronene dan etnis lainnya. Politisi etnis bugis, alih-alih mengandalkan konflik atau pemisahan, mungkin lebih memilih untuk bernegosiasi dan menjadikan politik identitas sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat lokal.

Dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bombana, etnis bugis dan moronene mungkin menggunakan lobi politik dengan tokoh-tokoh politik lintas etnis untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Mereka bisa saja membangun hubungan dengan pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan atau menggunakan pengaruh ekonomi untuk mendukung calon tertentu. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dominika Koter (2013) yang berjudul *King Makers: Local Leaders and Ethnic Politics in Africa*, dia menjelaskan bahwa dalam memobilisasi suara dibutuhkan perantara pemimpin lokal. Melalui

keberadaan pemimpin lokal yang berpengaruh memungkinkan terciptanya koalisi lintas etnis, membuat politik lebih inklusif dan mengurangi potensi konflik berbasis identitas. Dengan posisi pemimpin lokal yang dihormati dan dipercaya, mereka mampu mengarahkan dukungan politik tanpa harus mengandalkan sentimen etnis.

Oleh karena itu teori teori Milton J. Esman (1994) relevan dengan penelitian ini. Dimana Politik etnik dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bombana dapat memperlihatkan bagaimana identitas etnis digunakan secara strategis dalam proses politik. Mengacu pada teori Milton J. Esman (1994), bahwa dari keterlibatan etnis Bugis sebagai kelompok pendatang yang memobilisasi solidaritas etnis, serta munculnya kekuatan tandingan dari elit Moronene, menunjukkan bahwa politik etnik tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga arena negosiasi dan pembentukan koalisi.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul *“Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017)”* yang diterbitkan dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 8 No. 1, Januari 2023: Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai peran politik identitas etnis dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh pada tahun 2017, dengan fokus pada kemenangan pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Penelitian ini bertolak dari realitas bahwa dalam kontestasi politik lokal, identitas etnis sering dimobilisasi sebagai strategi untuk meraih dukungan masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan kontekstual terhadap dinamika politik identitas. Teori utama yang digunakan adalah teori Politik Identitas, dengan pendekatan Primordialisme dan Konstruktivisme, yang menjelaskan bagaimana identitas etnis terbentuk dan digunakan sebagai alat politik. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pasangan Irwandi-Nova tidak dapat dilepaskan dari strategi mereka dalam memainkan isu etnis, khususnya etnis Gayo yang merupakan etnis dari Nova. Dengan mengangkat identitas “putra daerah” serta menggunakan bahasa dan simbol budaya lokal dalam kampanye, pasangan ini berhasil meraih simpati pemilih di wilayah-wilayah basis etnis Gayo, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Persentase suara yang mereka peroleh di daerah tersebut cukup tinggi, menunjukkan bahwa pendekatan identitas etnis terbukti efektif.

Selain itu, kekuatan pasangan ini juga terletak pada dukungan koalisi partai yang terdiri dari partai nasional (Demokrat, PKB) dan partai lokal (PNA, PDA). Dukungan politik ini memberikan legitimasi dan jaringan yang lebih luas untuk memperkuat basis pemilih mereka. Penelitian ini juga menyoroti bahwa program-program yang ditawarkan pasangan Irwandi-Nova dinilai pro-rakyat, sehingga menambah daya tarik mereka di mata pemilih. Namun demikian, penulis juga mengingatkan bahwa meskipun strategi politik identitas dapat memberikan keuntungan elektoral, penggunaannya yang berlebihan dapat menimbulkan risiko polarisasi dan konflik intoleransi dalam masyarakat multietnis seperti Aceh.

Penelitian lain dilakukan oleh Arri Bima Prasetya yang berjudul "*Kajian Politik Identitas dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan*". Penelitian ini mengangkat isu penting mengenai keberadaan politik identitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2019 di Kota Tarakan. Kota Tarakan dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya yang multikultural dan multiagama, menjadikannya cerminan miniatur Indonesia yang sesungguhnya. Komposisi etnis dan agama yang sangat beragam di kota ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya politik identitas, terutama saat momentum pemilihan kepala daerah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana politik identitas digunakan dalam Pilkada 2019 di Tarakan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam menangani isu ini. Untuk menjawab tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan visual. Penelitian ini didasarkan pada tiga pendekatan teori identitas, yaitu: Primordialisme, Konstruktivisme dan Instrumentalisme

Dalam konteks Pilkada Tarakan 2019, politik identitas digunakan secara eksplisit melalui berbagai saluran, seperti media sosial, paguyuban berbasis etnis, dan tempat ibadah. Para kandidat dan tim sukses memainkan simbol-simbol identitas (etnis dan agama) untuk membentuk kedekatan emosional dengan pemilih. Salah satu temuan penting adalah bahwa masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan kesamaan latar belakang dengan calon daripada kapabilitas atau integritasnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa faktor pendukung berkembangnya politik identitas di Tarakan. Pertama Peran pasif pemerintah daerah, khususnya Badan

Kesbangpol, yang dinilai tidak cukup tegas dalam mengawasi praktik politik identitas. Isu etnis dan agama juga menjadi hal yang sensitif dan dimanfaatkan secara strategis oleh elit politik. Selain itu, Kekuatan elit politik lokal yang membentuk paguyuban untuk mengarahkan dukungan berdasarkan identitas.

Penelitian berjudul "*Hegemoni Etnik Bugis di Kabupaten Nunukan*" karya Akbar Najemuddin juga membahas mengenai dominasi etnis bugis. Penelitiannya terkait bagaimana kelompok etnis Bugis, sebagai pendatang dari Sulawesi Selatan, mampu membangun dominasi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya lokal, khususnya falsafah *tellu cappa*, dijadikan alat adaptasi dan hegemoni oleh etnik Bugis dalam lingkungan multi-etnis yang sebelumnya didominasi oleh etnik Dayak dan Tidung.

Tellu cappa, yang secara harfiah berarti "tiga ujung", merupakan filosofi hidup masyarakat Bugis dalam merantau, yang terdiri dari *cappa lila* (kemampuan berdiplomasi), *cappa orowane* (perkawinan lintas etnik), dan *cappa kawali* (keberanian dalam mempertahankan harga diri). Ketiga nilai tersebut menjadi landasan penting dalam proses integrasi sosial masyarakat Bugis dengan komunitas lokal di Nunukan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, membentuk hubungan kekeluargaan melalui pernikahan campuran, serta menunjukkan etos kerja dan keberanian, etnik Bugis perlahan membangun simpati dan kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Dampak dari proses adaptasi ini terlihat nyata dalam struktur sosial dan politik di Kabupaten Nunukan. Dalam bidang ekonomi, orang Bugis mendominasi sektor perdagangan dan pertanian, termasuk penguasaan lahan-lahan produktif. Dalam bidang politik, dominasi terlihat jelas melalui keterwakilan yang tinggi di lembaga legislatif (DPRD) serta keberhasilan tokoh-tokoh Bugis dalam memenangkan posisi kepala daerah sejak pemilihan pertama hingga sekarang. Secara historis, sejak tahun 2001 hingga 2020, seluruh bupati Nunukan berasal dari etnis Bugis, menandakan keberhasilan kelompok ini dalam membangun posisi hegemonik secara formal.

Penelitian ini dibangun dengan landasan teori hegemoni Antonio Gramsci yang menekankan bahwa kekuasaan tidak selalu dibangun dengan paksaan, melainkan melalui proses konsensus dan penerimaan nilai-nilai dominan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya Bugis digunakan bukan hanya sebagai alat integrasi,

tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial atas dominasi yang mereka bangun.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan pemahaman yang kuat mengenai bagaimana budaya dan identitas etnik bisa dijadikan alat politik yang efektif dalam membangun pengaruh dan kekuasaan. Etnisitas dalam hal ini bukan sekadar identitas warisan, tetapi dapat dioperasionalkan secara strategis dalam konteks sosial-politik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat multikultural, kekuatan budaya dapat menjadi dasar terbentuknya hegemoni baru yang berlangsung tidak dengan cara represif, tetapi melalui penerimaan sosial yang berlangsung secara halus dan bertahap.

Berdasarkan Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa politik identitas dan dominasi etnis merupakan strategi politik yang efektif dan jamak digunakan dalam konteks masyarakat multikultural. Identitas digunakan secara strategis oleh aktor politik untuk merebut kekuasaan, baik melalui narasi “putra daerah”, pemanfaatan simbol budaya, maupun adaptasi sosial yang diterima masyarakat. Meskipun demokrasi memberi ruang bagi semua kelompok untuk berkompetisi, dalam praktiknya kelompok mayoritas atau dominan cenderung menggunakan sistem tersebut untuk mempertahankan kekuasaan.

1.7. Kerangka berpikir

Kerangka Penelitian ini didasarkan pada kerangka konseptual teori *Strategis Politik Etnis* yang dikemukakan oleh Milton J. Esman (1994). Teori ini menjelaskan bahwa etnisitas bukan hanya sekadar identitas kultural, melainkan dapat dimanfaatkan secara strategis dalam arena politik untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks politik lokal, strategi politik etnis ini menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki komposisi etnis yang kompleks. Untuk menganalisis dominasi etnis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bombana, teori ini diterjemahkan ke dalam tiga konsep utama: mobilisasi identitas etnis, negosiasi dan koalisi politik, serta peran perantara tokoh lokal. Ketiganya menjadi instrumen analisis untuk mengurai bagaimana strategi politik etnis dijalankan secara praktis di tingkat lokal.

Pertama, mobilisasi identitas etnis menjelaskan proses di mana identitas etnis digunakan sebagai alat untuk membangun dukungan politik. Dalam hal ini, etnis Bugis memanfaatkan identitas kolektif mereka untuk menggalang suara, memperkuat solidaritas, dan menciptakan rasa keterwakilan dalam proses politik. Kedua, melalui negosiasi dan koalisi politik, kelompok etnis membentuk aliansi

strategis dengan kelompok lain guna memperbesar peluang menang dalam kontestasi pemilihan. Koalisi ini tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga melibatkan pertimbangan etnopolitik yang kompleks. Ketiga, tokoh lokal berperan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan politik dengan jaringan etnis di masyarakat. Tokoh-tokoh ini memiliki otoritas sosial dan politik yang memungkinkan mereka mempengaruhi preferensi politik masyarakat serta memperkuat dominasi kelompok etnis tertentu.

Melalui ketiga strategi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etnis Bugis mampu mendominasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bombana. Dominasi tersebut bukan semata hasil dari jumlah atau kekuatan elektoral, tetapi juga dari kecakapan dalam menggunakan strategi politik etnis secara sistematis dan kontekstual sesuai dengan struktur sosial politik lokal di Bombana.

1.8. Skema Penelitian

Gambar 1. Skema Penelitian



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara

2.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Agus Rustamana, Rohmah, Natasya, & Raihan, 2024). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau permasalahan sosial dengan menitikberatkan pada sudut pandang serta pengalaman langsung dari individu atau kelompok yang terlibat dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana dominasi etnis bugis dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bombana, termasuk faktor-faktor dominasi tersebut dengan melihat dari perpektif politik identitas. Tujuannya adalah sebagai referensi dalam kajian dan pengambilan keputusan mengenai **pengelolaan pluralitas** di kabupaten Bombana dan dalam sistem politik Indonesia yang lebih luas.

2.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi untuk mendukung penelitian mereka. Dalam penelitian kualitatif, sumber data sangat penting untuk memberikan gambaran mendalam dan kontekstual tentang fenomena. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

2.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa perantara (Uyuni, 2023). Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan informan yang relevan dengan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan. Informan kunci dalam penel

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis (Hidayat, 2022). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari hasil

studi kepustakaan, dimana metode pencarian data melalui pencarian, pengumpulan, dan analisis sumber data dari studi kepustakaan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid sehingga menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan kepada responden untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dengan panduan atau daftar pertanyaan. (Helviani, Kasmin, Juliatmaja, Nursalam, & Syahrir, 2021). Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau pendapat seseorang. Prosesnya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan mendengarkan jawaban yang diberikan, baik dengan format pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya maupun yang lebih fleksibel. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif atau eksploratif, guna memahami lebih dalam suatu isu atau fenomena. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian yaitu :

1. Bapak Heryanto yang merupakan ketua dpc Golkar Bombana sekaligus calon wakil bupati dari Andi Nirwana pada pilkada tahun 2024, ia memiliki pengalaman langsung terhadap mekanisme pencalonan dan metode kampanye pada pemilihan kepala daerah Bombana.
2. Bapak Suriadin sebagai ketua dpc PDIP Bombana, PDIP sebagai partai yang mengalami kekalahan dua kali berturut-turut di pilkada 2017 ketika mengusung Kasra yang merupakan calon dari Etnis Moronene dan di pilkada tahun 2024. Maka menarik mengetahui pengalamannya sebagai partai yang kalah.
3. Bapak Muhammad Anies, ia adalah sekertaris partai Gerindra dan mantan ketua dpc partai Matahari Bangsa pada tahun 2009. Ia juga memiliki pengalaman langsung terhadap pilkada Bombana sejak tahun 2010 dengan mengusung H. Tafdil yang dapat memenangkan pemilihan kepada daerah Bombana selama dua periode.
4. Bapak Kasim, Ketua DPC PPP dan sekaligus tim sukses dari pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani yang merupakan bupati terpilih pada pilkada tahun 2024.
5. Pemilih etnis bugis yang berada di Poleang dan Rumbia sebagai tempat wilayah yang di dominasi oleh Bugis, diantaranya Fauzy, Nurhawaida, Kasman.
6. Pemilih etnis moronene, sebagai penduduk asli Bombana yang juga memiliki populasi terbanyak setelah etnis bugis, diantara yang diwawancarai yaitu Hartini, Firman dan Mahesa.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelusuran informasi historis atau catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Contoh dokumen dalam bentuk tulisan termasuk catatan harian, riwayat hidup, cerita, arsip maupun gambar dan video yang menunjukkan pemilihan kepala daerah kabupaten Bombana. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara. Dokumentasi juga digunakan sebagai teknik untuk memvalidasi data. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Dokumen Mahkamah Konstitusi yang menyertakan data perolehan suara pada tahun pilkada 2010 pada putaran pertama dan putaran kedua, data ini digunakan untuk mengetahui perbandingan suara antara calon bugis dan moronene.
2. Dokumen putusan KPU mengenai data perolehan suara pilkada tahun 2017, data ini juga digunakan untuk mengetahui selisih perolehan suara antara etnis bugis dan moronene
3. Laporan KPU mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024, data ini digunakan untuk mengetahui daftar pemilih tetap di Bombana.
4. Berita dan artikel tentang pemilihan di tahun 2010, 2017 dan 2024

2.4 Analisis Data

Riset ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data secara deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini akan mencakup penjelasan baik secara lisan maupun tulisan dari para informan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi data, merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Kategorisasi, data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan elemen-elemen seperti strategi digital, pendekatan tatap muka, pengelolaan sumber daya, dan hubungan dengan tokoh (Rusli, 2011). Kategorisasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis dengan menciptakan struktur yang sistematis sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang konsisten dalam informasi penelitian.
3. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan.

4. Penarikan kesimpulan, merupakan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan.